

PEMBANGUNAN SOSIAL: WACANA, IMPLEMENTASI DAN PENGALAMAN EMPIRIK

Penyunting:
Dr. Ujianto Singgih Prayitno, M.Si

Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
2010

Pembangunan Sosial: Wacana, Implementasi, dan Pengalaman Empirik

Penyunting:

Dr. Ujianto Singgih Prayitno, M.Si.

Penulis:

Tim Peneliti Kesejahteraan Sosial P3DI Setjen DPR RI

Tata Letak:

Sony Arifin

Desain Sampul:

Ahans

Cetakan Pertama, 2010

ISBN: 978-979-9052-59-9

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Alamat:

Gedung Nusantara I, Lt. 2
Jln. Gatot Soebroto Jakarta Pusat 10270
Telp. 021-5715372

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Buku yang berjudul “Pembangunan Sosial: Wacana, Implementasi, dan Pengalaman Empirik” ini merupakan buku ketiga dengan judul yang hampir sama. Sebelumnya, sekitar tahun 2002, tim kesejahteraan sosial menerbitkan sebuah buku yang berjudul “Pembangunan Sosial,” dan pada tahun 2005 terbit buku yang berjudul “Kesejahteraan Sosial.” Ketiga buku ini memiliki kesamaan, yaitu merupakan kumpulan karangan, sebuah ciri yang khas buku-buku yang diterbitkan oleh sebuah lembaga penelitian. Sekilas, judul buku tersebut nyaris sama, karena tidak mudah menemukan judul sebuah buku yang dapat merangkum isu-isu yang sangat beragam yang kesemuanya meng-“klaim” sebagai isu pembangunan sosial dan/atau kesejahteraan sosial.

Tampaknya, “pembangunan sosial” memiliki arti yang berbeda dengan “Kesejahteraan sosial,” meskipun sering juga dijumpai istilah “Pembangunan Kesejahteraan Sosial”. Pembangunan sosial merupakan konsep yang menunjuk pada suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sejalan dengan proses pembangunan ekonomi.* Artinya, pembangunan sosial diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, yaitu terpemenuhinya kebutuhan fisik dan sosialnya. Program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial

* Banyak negara berkembang yang menempatkan keberhasilan pembangunannya pada pertumbuhan ekonomi yang sering menimbulkan persoalan dengan pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi tersebut. Pembangunan ekonomi, tidak serta merta mengurangi angka kemiskinan, kecuali dalam data statistik. Pembangunan sosial sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan, pada awal perkembangannya, seringkali dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi, yang dikonotasikan sebagai perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh industrialisasi. Persoalan inilah yang antara lain memunculkan konsep pembangunan sosial sebagai kritik terhadap pembangunan yang terfokus pada kemajuan ekonomi dan tidak memperhatikan aspek sosial. Berbeda dengan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, tidak hanya menawarkan kesejahteraan di bidang ekonomi saja, tetapi juga kesejahteraan di bidang sosial. Pembangunan sosial menghendaki adanya harmonisasi kebijakan pertumbuhan ekonomi dengan merancang pengukuran yang memajukan pembangunan sosial.

sejauh ini, antara lain mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan sosial yang selama ini dibangun dan dikembangkan oleh negara-negara berkembang, biasanya mengadopsi program pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara maju, seperti Inggris, Amerika, Australia dan negara maju lainnya. Di negara-negara maju tersebut, kesejahteraan sosial sangat identik dengan jaminan sosial (*social security*), seperti *public assistance* dan *social insurance*, yang diselenggarakan negara terutama untuk masyarakat yang kurang beruntung atau miskin.

Sementara itu, pembangunan kesejahteraan sosial berorientasi pada peningkatan pranata sosial dan keberfungsian sosial yang mencakup kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, melaksanakan peran sosial dan menghadapi goncangan dan tekanan kehidupan. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial mencakup individu dan masyarakat dari berbagai kelas ekonomi, tetapi sasaran utama pelayanan kesejahteraan sosial adalah kelompok masyarakat yang tergolong kurang beruntung. Sedangkan, kesejahteraan sosial dalam arti luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Atau jika dirumuskan secara berbeda, kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya.

Pembangunan sosial bukanlah persoalan yang sederhana dan tidak dapat direduksi dalam kebijakan parsial seperti subsidi pemerintah. Kebijakan ini sangat jelas terlihat sejak terjadinya reformasi politik, karena Indonesia pada saat itu dihadapkan dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Perhatian pemerintah yang sudah berganti-ganti sangat terfokus pada penyelamatan ekonomi dan program subsidi untuk orang miskin. Program pembangunan sosial sangat lemah baik dari segi konsep, topangan institusi pelaksana, perhatian politik, dan sumber daya.

Saat ini, ketika krisis ekonomi sudah mulai teratasi semestinya pemerintah lebih menaruh perhatian pada pembangunan sosial, agar tidak kembali terpuruk dalam krisis ekonomi, jika tetap berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan yang memadai. Pembangunan sosial di samping akan menumbuhkan kesiapan bangsa ini agar dapat bertahan dan terus membangun, juga meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang terbatas, dengan inovasi unggul di tengah keterbatasan dan persaingan.

Menurut Midgley, pembangunan sosial memiliki tiga strategi besar yaitu *pertama*, pembangunan sosial oleh individu, yang dikenal juga sebagai pendekatan individualis atau perusahaan. Pendekatan ini memiliki akar ideologi liberal atau individualis, yang menekankan pada pentingnya kebebasan individu dalam memilih. Pendekatan individualis atau perusahaan memang saat ini tidak populer dalam pembangunan sosial. Pendekatan ini dipromosikan melalui peningkatan fungsi sosial individu dan hubungan antarpribadi. Dalam strategi ini, individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan guna memberdayakan masyarakat.

Kedua, pembangunan sosial oleh komunitas yang juga dikenal sebagai pendekatan komunitarian. Pendekatan komunitarian dipengaruhi oleh ideologi populis. Strategi ini percaya bahwa antara masyarakat dan komunitas memiliki kemampuan yang saling terkait untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan teratasinya masalah sosial komunitas tersebut. *Ketiga*, pembangunan sosial oleh pemerintah yang lebih dikenal sebagai pendekatan statis. Pendekatan statis didasari oleh ideologi kolektivis atau sosialis yang lebih menekankan pada pentingnya kolektivitas, yang dibangun dari asosiasi masyarakat yang memiliki sumber daya secara kolektif dan membagi wewenang untuk membuat keputusan. Melalui strategi ini pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi dalam pemerintahan.

Buku ini terdiri dari tiga bagian, yaitu wacana, implementasi dan pengalaman empirik. Bagian pertama adalah wacana, yang di dalamnya terdapat beragam artikel, mulai dari catatan kritis tentang penanggulangan kemiskinan, perspektif pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat yang dinilai sebagai esensi dasar dalam pembangunan kesejahteraan sosial, masalah peradilan anak, sampai wacana tentang perubahan iklim. Luasnya cakupan wacana ini, semakin memperlihatkan kompleksitas isu yang dapat dirangkum dalam perspektif pembangunan sosial ini.

Bagian kedua merupakan implementasi konsep pembangunan sosial terutama dalam perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Pada bagian ini keragaman artikel terlihat makin membesar. Artikel pada bagian ini mengulas mulai dari analisis terhadap undang-undang seperti undang-undang tentang kesehatan jiwa dalam upaya mendorong pembangunan sosial, implementasi undang-undang tentang pengelolaan sampah, undang-undang gerakan pramuka implementasinya terhadap moral remaja, sampai isu-isu yang ber-

kaitan dengan pluralisme agama dalam kerukunan umat beragama dan profesionalisme guru dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Akhirnya, bagian ketiga buku ini merupakan pengalaman empirik yang merangkum pengalaman penelitian lapangan tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan melalui pengembangan sektor informal: Kasus Yogyakarta, kemudian isu tentang fenomena mutu pelayanan rumah sakit, peningkatan pelayanan kesehatan preventif dan promotif di Puskesmas, dan isu mengenai integrasi obat herbal ke dalam sistem pelayanan kesehatan formal.

Semoga keseluruhan isu yang diulas dalam buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, *Wa Allahu A'lam bis Shawab*.

Jakarta, Desember 2010

Ujiyanto Singgih Prayitno

DAFTAR ISI

Bagian Pertama: Wacana

Catatan Kritis tentang Penanggulangan Kemiskinan <i>Hartini Retnaningsih</i>	3
Perspektif Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Sosial <i>Dina Martiany</i>	19
Pemberdayaan Masyarakat Menjadi Esensi Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial <i>Herlina Astri</i>	37
Perlindungan Anak di Indonesia <i>Mohammad Teja</i>	57
Adaptasi Perubahan Iklim <i>Teddy Prasetiawan</i>	79
Terorisme Berbasis Agama dan Penanganannya <i>A. Muchaddam Fahham</i>	101

Bagian Kedua: Implementasi

Pembentukan Undang-undang Kesehatan Jiwa sebagai Upaya Mendorong Pembangunan Sosial <i>Lukman Hakim</i>	123
Tantangan dalam Implementasi Undang-undang tentang Pengelolaan Sampah <i>Anih Sri Suryani</i>	143

Peran Pendidikan Kepramukaan terhadap Perkembangan Moral Remaja <i>Sulis Winurini</i>	167
Pluralisme Agama dan Upaya Menuju Kerukunan Umat Beragama <i>Dinar Wahyuni</i>	185
Profesionalisme Guru dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Menuju Pembangunan Sosial <i>Faridah Alawiyah</i>	203

Bagian Ketiga: Pengalaman Empirik

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan melalui Pengembangan Sektor Informal: Kasus Yogyakarta <i>Ujianto Singgih Prayitno</i>	225
Fenomena Mutu Pelayanan Rumah Sakit antara Harapan dan Kenyataan <i>Tri Rini Puji Lestari</i>	243
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Preventif dan Promotif di Puskesmas <i>Rahmi Yuningsih</i>	269
Integrasi Obat Herbal ke dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Formal <i>Hana Nika Rustia</i>	287
Pendidikan Masa Kini dan Perkembangan Moral Anak <i>Elga Andina</i>	305